

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintahan merupakan salah satu sektor publik yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan bagi kesejahteraan masyarakat. Tugas utama yang penting tersebut dapat ditunjukkan melalui pelayanan yang diberikan yang menunjukkan kinerja suatu instansi pemerintahan. Organisasi sektor publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang memiliki kaitan erat dengan kepentingan umum serta penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2013).

Pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu mnaajer publik dalam penilaian pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memnuhi tiga tujuan yaitu : 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ketiga tujuan tersebut mengacu pada akuntabilitas publik yang merupakan pemberian informasi kepada

publik dan konstituen lain yang merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mardiasmo, 2018).

Definisi akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawabandan keterangan (Mahmudi, 2013). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan instansi pemerintah sebagai organisasi sektor publik mampu menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi bagaimana instansi pemerintah mampu mengolah dan menyajikan laporan keuangan secara ekonomis, efektif, dan efisien atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah (Puspitasari, 2013).

Pengukuran kinerja sektor publik sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik sehingga tepat sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan maksud : Pertama, untuk membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, hal ini akan mampu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, kinerja sektor publik digunakan sebagai pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2015) meliputi aktivitas penerapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi. Sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitoring serta memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pendekatan *value for money* yang merupakan jembatan untuk mengetahui kinerja sektor publik. Konsep *value for money* juga digunakan peneliti untuk mengukur apakah kegiatan oleh organisasi sektor publik sudah terlaksana dan memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : 1.) Ekonomi, hal ini berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan. 2.) Efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan penggunaan *input* yang terendah

guna mencapai *output* tertentu. 3.) Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2010).

Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara berupa penyediaan pangan serta penyuluhan pertanian bagi masyarakat. Secara umum fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta evaluasi di bidang sarana prasarana, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Akan tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara yakni masyarakat masih mempertanyakan nilai (keberhasilan setiap program) yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Meskipun banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah namun masyarakat belum cukup puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karena masih kurangnya jumlah tenaga penyuluhan pertanian lapangan untuk melakukan pelayanan penyuluhan pertanian ke seluruh desa/kelurahan Kabupaten Jepara secara rutin, bantuan dana dari pemerintah belum merata, kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah bagi petani, serta belum semua penyuluh pertanian lapangan mempunyai kompetensi di bidang pertanian sehingga ketika adanya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat

penyuluh pertanian belum mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga masyarakat belum puas atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu diadakannya pengukuran kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk melihat pelayanan yang diberikan bagi masyarakat, sehingga nantinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mampu mengelola keuangan yang ditunjukkan melalui laporan realisasi anggaran sebagai laporan hasil kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sangat diperlukan guna melihat dan mengukur seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam periode tertentu. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan merupakan faktor penting sebuah organisasi sektor publik untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, karena apabila organisasi sektor publik tidak melakukan pengukuran kinerja keuangan, akan timbul kesulitan dalam mengelola keuangan.

Dengan memperhatikan kinerja keuangan instansi pemerintah yang semakin menjadi sorotan, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara dengan menggunakan pendekatan *Value For*

Money sehingga pemerintah Kabupaten Jepara dapat meningkatkan kinerja keuangan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Jepara)"**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jepara dengan menggunakan data yang telah disusun oleh salah satu instansi Pemerintah Daerah yakni data Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah dan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 serta Laporan .

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah suatu pernyataan mengenai kondisi dimana masih memerlukan penelitian atau pengamatan untuk menjawabnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi ekonomi ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi efisiensi?

3. Bagaimana kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi efektivitas?

1.4 Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba membuat batasan masalah dalam penyusunan penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan semula dan yang menjadi batasan masalah adalah :

1. Penulis membatasi Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara yang bersumber dari Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah dan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020.
2. Penulis membatasi laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah dan Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Dinas Ketahanan Pangan yang akan diteliti dibatasi oleh lingkup lingkungan yang terbatas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi ekonomi.
2. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai dengan 2020 ditinjau dari segi efektivitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mempelajari dan mengevaluasi mengenai "**Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Jepara)**".

2. Manfaat Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kinerja keuangan dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi-potensi daerah Jepara.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian bermanfaat serta dapat menjadi masukan pengetahuan dan wawasan mengenai objek yang diteliti untuk dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada dalam penelitian di kemudian hari.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada Skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman pernyataan orisinalitas skripsi, halaman kata pengantar,

halaman daftar isi, halaman tabel (jika ada), halaman gambar (jika ada), dan halaman lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian Inti terdiri atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka dan pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III Berisi tentang variabel dan definisi operasional penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV Berisi mengenai pembahasan hasil analisis data secara lebih khusus dan pengambilan solusi dari permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

BAB V Berisi tentang kesimpulan dan saran dari skripsi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.